

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai analisis pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Partisipasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Madya Jakarta Timur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif ($b_1 = 0.392$) dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.187 > t_{0,05 (48)} = 2.011$) dan signifikan ($\text{sig } t = 0.034 < 0.05$) terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak, artinya semakin besar Kepatuhan Wajib Pajak maka semakin meningkat pula Efektivitas Penerimaan Pajak pada KPP Madya Jakarta Timur.
2. Sikap Aparat Pajak berpengaruh positif ($b_2 = 0.387$) dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.918 > t_{0,05 (48)} = 2.011$) dan signifikan ($\text{sig } t = 0.005 < 0.05$) terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak, artinya semakin besar Sikap Aparat Pajak maka semakin meningkat pula Efektivitas Penerimaan Pajak pada KPP Madya Jakarta Timur.
3. Partisipasi Wajib Pajak berpengaruh positif ($b_3 = 0.131$) dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4.156 > t_{0,05 (48)} = 2.011$) dan signifikan ($\text{sig } t =$

0.000 < 0.05) terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak, artinya semakin besar Partisipasi Wajib Pajak maka semakin meningkat pula Efektivitas Penerimaan Pajak pada KPP Madya Jakarta Timur.

4. Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Partisipasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan dengan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($69.740 > 2.807$) dan ($sig F = 0.000 < 0.05$) terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Madya Jakarta Timur. Kemudian sebanyak 82% variasi pada Penerimaan Pajak ditentukan oleh Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Partisipasi Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 18% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diberikan implikasi bahwa terdapat pengaruh positif Kepatuhan Wajib Pajak, Sikap Aparat Paja, dan Partisipasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak, oleh karena itu disarankan KPP Madya Jakarta Timur diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu hendaknya dilakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar akan fungsi pajak akan memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

KPP Madya Jakarta Timur juga harus selalu memberikan persepsi yang baik kepada masyarakat mengenai kegunaan tujuan dan kegunaan membayar pajak, dan akan arti pentingnya pajak untuk pembangunan yang nantinya akan dinikmati juga oleh seluruh masyarakat. Selain itu juga perlu adanya pemberian penyuluhan tentang perpajakan secara berkala terhadap seluruh lapisan masyarakat agar partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak tetap terjaga.

Bagi pemerintah khususnya aparat yang berwenang diharapkan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap para Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara agar penerimaan pajak negara dapat meningkat. Perlu lebih giat dalam mensosialisasikan pajak kepada masyarakat. Sosialisasi ini tidak hanya sebatas pada pelaksanaan kewajiban wajib pajak, namun juga hak dari wajib pajak. Disamping itu, perlu mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan system administrasi perpajakan.

Bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain selain variabel dalam penelitian ini untuk diteliti pada masa yang akan datang.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini maupun untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Responden pada penelitian tidak hanya pada aparat pajak yang bekerja sebagai karyawan saja, tetapi pada aparat pajak yang kedudukannya lebih tinggi agar hasil lebih maksimal.
2. Agar waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama dalam memperoleh surat izin dan data, peneliti harus sering mendatangi kantor pajak.
3. Sebaiknya peneliti tidak hanya menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian, tetapi melakukan wawancara dan tanya jawab langsung kepada aparat pajak yang bersangkutan agar hasil lebih maksimal.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan satu KPP saja sebagai sampel agar hasil dapat mewakili secara menyeluruh.